BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Instansi

Awal kelistrikan di Bumi Parahyangan sudah ada semenjak Pemerintah Kolonial Belanda masih bercokol di tataran tanah Sunda. Di tahun 1905, di Jawa Barat khususnya kota Bandung, berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan publik. Nama perusahaan itu ***Bandungsche Electriciteit Maatschaappij*** **(BEM)**.

Dalam perjalanannya, BEM pada tanggal 1 Januari 1920 berubah menjadi Perusahaan Perseroan menjadi ***Gemeenschapplijk Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng*** **(GEBEO)** yang pendiriannya dikukuhkan melalui akte notaris Mr. Andriaan Hendrik Van Ophuisen dengan Nomor: 213 pada tanggal 31 Desember 1949.

Setelah kekuasaan penjajahan beralih ke tangan Pemerintah Jepang, di antara rentah waktu 1942 - 1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh ***Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha*** dengan wilayah kerja di seluruh Pulau Jawa.

Setelah Indonesia merdeka, tahun 1957 menjadi awal penguasaan pengelolaan penyediaan tenaga listrik di seluruh tanah air yang ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia.
27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian dikukuhkan lewat Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1958 j.o. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1959.

Selanjutnya, di tahun 1961 melalui Peraturan Pemerintah No. 67 dibentuk **Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN)** sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Sejalan dengan itu, PLN Bandung pun berubah menjadi **PLN Exploitasi XI** sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tangerang.

Pada tahun 1970-an dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang menyebutkan status PLN menjadi **Perusahaan Umum Listrik Negara**. Kemudian, berdasarkan Pengumuman PLN Exploitasi XI No. 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi **Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat**.

Memasuki era 1990-an, dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1994 pada tanggal 16 Juni 1994, Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama **PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat** sejak tanggal 30 Juli 1994.

Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001 yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat menjadi **PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.**

Pada akhirnya, dengan mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah lagi namanya menjadi **PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten**, di mana **wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten**, hingga saat ini.

1.2 Visi dan Misi Instansi

Visi :

- Terwujudnya sumber pelistrikan yang efisien bagi masyarakat khususnya masyarakat untuk wilayah jawabarat dan banten.

Misi :

- Melayani dan memelihara pelistrikan bagi masyara sekitar.

1.3 Logo Instansi

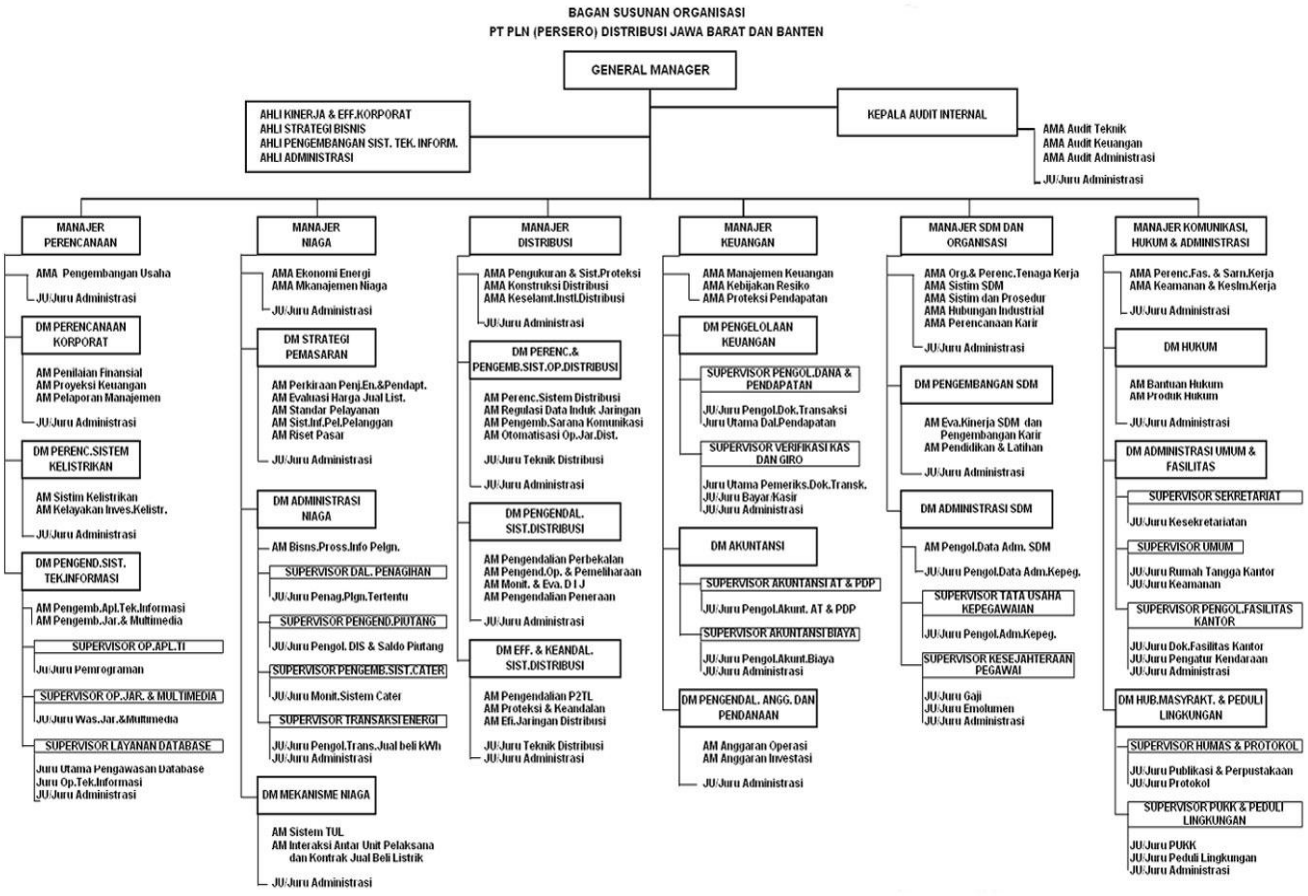


Gambar 1.1 Logo Instansi

1.4 Struktur Organisasi



Gambar 1.2 Struktur organisasi



Gambar 1.3 Struktur Organisasi

1.5 Wilayah kerja & Front liner

Luas wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (PLN DJBB) menjangkau lebih dari 42.196 km² yang meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, kecuali Tangerang.

Jumlah konsumen yang mencapai lebih dari 8,474 juta pelanggan, atau 22 % dari jumlah pelanggan PLN secara nasional, menjadikan PLN DJBB merupakan Unit PLN terbesar di Indonesia.

Wilayah dan beban kerja yang sedemikian besarnya, dikelola oleh Unit-unit Pelaksana Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD), dengan komposisi sebagai berikut:

- Area Pelayanan Jaringan (APJ) : 16 Unit
- Area Pengatur Distribusi (APD) : 1 Unit
- Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) : 100 Unit
- Unit Pelayanan dan Jaringan Prima (UPJ Prima) : 7 Unit
- Kantor Pelayanan (KP) : 191 KP

Adapun Unit-unit Pelaksana tersebut adalah :

1. APD Bandung
2. APJ Bandung

3. APJ Banten Utara
4. APJ Banten Selatan
5. APJ Bekasi
6. APJ Bogor
7. APJ Cianjur
8. APJ Cimahi
9. APJ Cirebon
10. APJ Depok
11. APJ Garut
12. APJ Gunung Putri
13. APJ Karawang
14. APJ Majalaya
15. APJ Purwakarta
16. APJ Sukabumi
17. APJ Sumedang
18. APJ Tasikmalaya

1.6 POTENSI DAN TANTANGAN KE DEPAN

1.6.1 Potensi

Di masa depan, perkembangan kelistrikan di Jawa Barat dan Banten diperkirakan masih akan terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini disebabkan besarnya potensi yang ada di Jawa Barat dan Banten khususnya, maupun potensi karena lingkungan nasional yang lebih kondusif, diantaranya :

1. Rasio Elektrifikasi yang relatif masih rendah (58%)
2. Daftar tunggu calon pelanggan PLN yang relatif masih cukup besar
3. Pertumbuhan ekonomi dan produk ekspor relatif semakin prospektif
4. Posisi Jawa Barat dan Banten sebagai penyangga ibukota negara RI
5. Potensi alam sebagai modal pertumbuhan pariwisata daerah
6. Potensi sumber energi terbarukan yang sangat besar, khususnya panas bumi dan air.
7. Berkembangnya sektor Jasa dan Agrobisnis
8. Perkembangan daerah sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah
9. Minat Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi di bidang Kelistrikan
10. Perkembangan Teknologi, khususnya Teknologi Informasi dan komunikasi
11. Dibangunnya beberapa unit pembangkit baru di Jawa Barat & banten
12. Potensi pengembangan jaringan distribusi melalui jaringan 70 kV
13. Potensi excess power dari pelanggan besar yang memiliki pembangkit sendiri
14. Potensi-potensi bisnis baru yang timbul dari telah adanya Jalan Tol Cipularang
15. Peluang sinergi dengan BUMN lain (Bank, PT Pos, dll)
16. Peluang sinergi dengan Anak Perusahaan (Icon+, JP, dll)

1.6.2 Tantangan

Selain adanya potensi yang memberikan peluang pertumbuhan yang cukup optimis di masa depan, PLN DJBB menghadapi pula beberapa hal yang menjadi tantangan untuk diselesaikan atau bahkan untuk menciptakan peluang usaha baru bagi PLN DJBB. Adapun beberapa tantangan yang ada antara lain :

1. Adanya Visi 75 / 100 dan Visi Caang 2010, menuntut segenap jajaran PLN DJBB untuk bekerja lebih keras lagi untuk merealisasikannya di tengah keterbatasan finansial investasinya.

2. Kenyataan bahwa harga jual tenaga listrik lebih rendah dibandingkan dengan biaya pokok penyediaan tenaga listrik, menjadi tantangan tersendiri bagi PLN DJBB untuk secara signifikan meningkatkan efisiensi
3. Pertumbuhan konsumsi energi listrik yang masih relatif tinggi di Jawa Barat & Banten menuntuk PLN DJBB untuk lebih antisipatif dan sistematis dalam penyiapan infrastruktur dan layanannya.
4. Adanya tren pelanggan besar untuk membangun pembangkit listrik sendiri, sehingga dalam jangka pendek mereka meminta untuk turun daya
5. Masih besarnya penduduk yang belum menikmati listrik, sedangkan pada umumnya diperlukan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur kelistrikannya
6. Keterbatasan investasi untuk penyediaan listrik PLN, telah memunculkan keinginan beberapa pihak untuk membangun kawasan eksklusif penyediaan listriknya (seperti kasus Cikarang Listrindo)
7. Belum adanya Gardu Induk di kawasan Selatan Jawa Barat dan Banten yang mengakibatkan tegangan suplai ke pelanggan sangat drop.
8. Sangat besarnya beban kerja beberapa APJ (misal APJ Bekasi dan APJ Bogor), sehingga diperlukan pembentukan APJ-APJ baru.
9. Masih rendahnya rasio-rasio distribusi (misal ratio kVA trafo distribusi terhadap kVA trafo GI) yang menyebabkan timbulnya *bottle-neck* maupun rendahnya tingkat keandalan.
10. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh, misalnya kenaikan harga minyak dunia, instabilitas situasi politik daerah karena Pilkada atau lainnya, tingkat inflasi, kebijakan UMP, gejolak kurs valuta asing, masyarakat yang semakin kritis, dan sebagainya.

1.7 STRATEGI DAN KEBIJAKAN YANG INOVATIF

- **Payment Point Online Bank (PPOB)**

  Pada tahun 2007 di-launch sebuah kebijakan yang inovatif, yaitu *Payment Point On-line* Bank (PPOB). PPOB adalah sebuah layanan pelunasan rekening listrik secara *online* yang memanfaatkan infrastruktur milik Bank. Dengan demikian pelanggan dapat membayar di ATM maupun *payment point* mana pun dan kapanpun. Model ini berhasil pula memunculkan peluang usaha baru bagi masyarakat berupa usaha *payment point*. Di sisi PLN selain mendapat nilai tambah berupa *revenue protection*, namun juga sebuah efisiensi signifikan karena tidak perlu membangun infrastruktur *online* sendiri.

- **Layanan Penyambungan Baru / Perubahan Daya Melalui Jasa PT Pos**

  Sebuah kebijakan strategis inovatif lainnya adalah Sinergi dengan PT Pos dalam jasa layanan sambungan baru (PB) maupun perubahan daya (PD). Masyarakat kini dapat mengajukan permohonan PB / PD di kantor Pos secara transparan, mudah dan cepat. Kebijakan ini menuntut segenap jajaran PLN untuk lebih antisipatif dan responsif dalam layanan PB / PD.

- **Tusbung *Online***

  Pelaksanaan pemutusan sementara kepada penunggak listrik secara *online* dan *mobile*. Pelanggan yang menunggak akan didatangi oleh petugas, dan dilakukan pemutusan, namun pelanggan tersebut dapat langsung membayar di lokasi serta langsung disambung kembali. Model ini lebih ditujukan pada pembudayaan membayar listrik tepat waktu.

- **Layanan *Prepaid* (=Prabayar, Masih dalam Tahap *Pilot Project*)**

Fenomena prepaid begitu meluas pada waktu penggunaan komunikasi seluler memasyarakat. Dan PLN DJBB tidak mau ketinggalan dengan model itu. Dengan layanan *prepaid* (prabayar), maka pelanggan akan membayar dulu 'pulsa' listriknya (di sini diistilahkan dengan *token*). Model ini cukup prospektif mengingat bahwa sistem ini akan membantu masyarakat kecil dalam pembayaran listriknya secara 'eceran'. Di sisi lain, sistem ini akan merangsang masyarakat dalam pembudayaan penghematan energi.

- ***Lending Working-Capital***

  Sebuah peluang bagi pelanggan besar PLN DJBB untuk menjamin ketepatan waktu pelunasan tagihan listrik, tanpa dihantui denda keterlambatan. Yaitu dengan skema kerjasama segitiga : Pelanggan-Bank-PLN DJBB. Pihak Bank akan membantu menyediakan dana talangan untuk melinasi tagihan listrik pelanggan, dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan denda keterlambatan PLN.

- **Implementasi Teknologi Baru**

  Mulai 2008 PLN DJBB akan banyak mengimplementasikan penerapan Teknologi Baru dalam operasionalnya. Teknologi baru tersebut dapat berupa teknologi informasi, otomasi, telekomunikasi, pemanfaatan GIS *(Geographical Information System)*, pemulihan gangguan dan sebagainya.

2.8 PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Sebagai tanggungjawab moral dan sosial Perusahaan kepada lingkungan, yang didorong oleh rasa kepedulian dan keinginan untuk terlibat aktif dalam membangun potensi sosial kemasyarakatan, maka PT PLN DJBB mengembangkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

2.8.1 Program Kemitraan

Program ini merupakan perwujudan nyata PLN DJBB untuk turut terlibat dalam pengembangan ekonomi rakyat, khususnya sektor usaha kecil dan menengah.
Sejak digulirkan pada tahun 1992, PT PLN DJBB telah membina 2.460 Mitra Binaan Usaha Kecil dan Koperasi yang tersebar di seluruh Jawa Barat dan Banten, dengan total nilai Rp 15,71 milyar. Program Kemitraan ini berbentuk pinjaman lunak modal kerja dan investasi, pelatihan, pengembangan manajemen, promosi dan pemasaran.

2.8.2 Program Bina Lingkungan (Community Development)

Program ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab moral dan sosial PLN DJBB dalam hal kepedulian sosial terhadap lingkungan dan masyarakatnya, sebagai wujud *corporate social responsibility* (CSR).
Program ini diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial untuk korban bencana alam, beasiswa untuk siswa / mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, bantuan untuk pembangunan fasilitas sosial-keagamaan, bantuan kepada anak cacat, pengobatan massal bagi keluarga kurang mampu, dan bentuk kepedulian sosial lainnya